

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, pendidikan memiliki peran penting dan strategis. Peningkatan kualitas tersebut meliputi aspek intelektual (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor). Pendidikan bagi suatu negara merupakan sesuatu hal yang penting, sebab maju tidaknya suatu negara dapat dilihat dari aspek pendidikannya. Penjelasan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ihsan (2001) yakni sebagai berikut:

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan efisien akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (hlm. 1).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan alat yang dilakukan oleh suatu Negara untuk melaksanakan pembangunan nasional, dalam pelaksanaan pendidikan tersebut harus dilakukan secara efektif, efisien dan tertata dengan baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dalam periode pengembangan pendidikan di Indonesia, setiap masa mempunyai karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Termasuk pengembangan pendidikan pada masa awal berdirinya Republik Indonesia, pada masa ini tujuan pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Negara

(Rasyidin, dkk, 2013, hlm. 164). Tujuan tersebut di latar belakang oleh kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya.

Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata tidak serta-merta mengubah situasi dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan perjanjian Postdam, negara-negara Sekutu yang memenangkan perang bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki Negara yang kalah perang pada koloni sebelumnya (Saleh, 2000, hlm. 18). Oleh karenanya, Jepang, yang merupakan negara yang kalah dalam perang, harus memberikan wikayah jajahannya kepada Sekutu.

Kahin (1995, hlm. 179) menyatakan bahwa dalam peta politik dunia saat itu wilayah Indonesia sebagian besar diserahkan kepada markas besar komando pasukan Inggris yang bernama *South East Asia Command* (SEAC) yang berkedudukan di Kolombo, Srilangka, dibawah pimpinan Lord L. Mountbatten. SEAC memiliki prioritas utama untuk memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang kalah dalam Perang Dunia II, dalam hal ini adalah Jepang. Mengingat luasnya tugas SEAC yang mencakup wilayah Burma, Muangthai, Indo Cina dan Semenanjung Malaya, maka mengenai urusan pendudukan di wilayah Hindia Belanda dibentuk satuan khusus yang bernama *Allied Forces Netherland East Indies* (AFNEI). Hal tersebut senada dengan pernyataan Saleh (2000, hlm. 57-58) yang menyatakan bahwa pasukan sekutu yang didalamnya terdiri dari pasukan Inggris dan Australia baru akan masuk ke wilayah-wilayah yang diduduki Jepang setelah penandatanganan secara resmi dokumen penyerahan tanggal 2 September 1945.

Tugas pasukan AFNEI adalah untuk menyelesaikan urusan RAPWI (*Recovery of Allied Prisonner of War and Interneers*) yaitu pengurusan dan pemulangan tawanan perang dan interniran Sekutu di Indonesia. Mountbatten menginstruksikan agar pasukan Sekutu menerima penyerahan kekuatan bersenjata Jepang, membebaskan tawanan perang dan tawanan sipil, serta melucuti dan menerima penyerahan kekuatan bersenjata Jepang. Disamping itu, menurut Kahin (1995, hlm.

179) adalah harus membentuk dan menjalankan keamanan dan ketertiban di Indonesia, sampai pemerintah Hindia Belanda sudah dapat berfungsi sendiri. Pada awalnya kedatangan pihak sekutu ini disambut dengan tangan terbuka oleh pejabat-pejabat RI karena pihak sekutu dalam wawancaranya dengan pers di Singapura menyatakan bahwa tugasnya hanya membebaskan tawanan perang dan tidak akan mencampuri urusan politik serta menyingkirkan pemerintahan RI. Akan tetapi pasukan sekutu justru membawa serdadu Belanda yang tergabung dalam *Nederland Indische Civil Administration* (NICA) yang terang-terangan ingin menegakan kembali kekuasaan Hindia Belanda (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010, hlm. 186). Melihat hal tersebut, maka pihak Indonesia menjadi curiga terhadap sekutu dan mulai melakukan berbagai perjuangan untuk mempertahankan dan menegakan kemerdekaannya.

Untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia, tidaklah cukup dengan adanya perjuangan rakyat yang bersifat perlawanan tradisional saja, melainkan diperlukan sebuah sistem pertahanan yang bersifat nasional. Untuk itu pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengumumkan terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang tugasnya ialah memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan (Sundhaussen, 1986, hlm. 17). Pada awalnya BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang tugasnya ialah menjaga terjaminnya keamanan dan ketertiban umum. Namun pada kenyataannya BKR tidak hanya sekedar sebagai “penjaga”, melainkan merupakan korps pejuang bersenjata yang memelopori dan dan memutar roda revolusi (Soewito, Suyono, dan Suhartono, 2008, hlm 17). BKR memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia di matra darat, laut maupun udara. Untuk itu di wilayah yang memiliki pangkalan udara dibentuklah BKR Oedara seperti di Pandangwangi (Lumajang), Bugis (Malang), Maospati (Madiun), Morokrengan (Surabaya), Panasas (Surakarta), Kalibanteng (Semarang), Jatiwangi (Cirebon), Cililitan (Jakarta), Gorda (Banten), dan beberapa tempat lainnya (Soewito, Suyono, dan Suhartono, 2008, hlm 18).

Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai peningkatan organisasi BKR. Di daerah-daerah yang memiliki pangkalan udara kemudian ditingkatkan pula menjadi TKR Jawatan Penerbangan. Pada tanggal 1 Januari 1946 Presiden Soekarno sempat mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dengan singkatan tetap TKR. Kemudian pada 24 Januari 1946 Presiden Soekarno melakukan perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Djawatan Penerbangan (Sutrisno, 1985, hlm. 40). Peningkatan status dari BKRO ke TKRO kemudian pada perkembangan selanjutnya menjadi TRI jawatan Penerbangan atau AURI memperoleh hasil yang membanggakan, sebab menurut Soewito, Suyono, dan Suhartono (2008) menyatakan bahwa:

Dalam waktu beberapa minggu saja, TKRO berhasil menguasai sejumlah besar lapangan terbang serta berbagai pesawat terbang yang dapat digunakan sebagai modal pembentukan kekuatan udara Republik Indonesia. Misalnya saat berhasil menguasai lapangan Terbang Morokrembangan yang didalamnya terdapat kira-kira 38 pesawat dari berbagai macam jenis. Bahkan di bulan September 1945 Mutakat Hurip menyerahkan 105 pesawat peninggalan Jepang (hlm. 19).

Dengan berhasil dikuasainya beberapa pangkalan udara serta pesawat peninggalan Jepang, maka timbul sebuah permasalahan yaitu siapa yang akan mengemudikan pesawat-pesawat tersebut, sebab pada awal kemerdekaan jumlah penerbang masih sangat terbatas, bahkan menurut Zed (2012) saat itu “jumlah penerbang Indonesia tidak lebih dari sembilan orang, ditambah dengan dua orang tenaga teknisi”. Untuk menjawab tantangan kurangnya pilot tersebut, maka pada tanggal 15 November 1945 didirikanlah Sekolah Penerbang di Maguwo. Memang sekolah penerbang Maguwo bukanlah merupakan sekolah penerbang pertama, sekolah penerbang pertama pada masa revolusi didirikan di Lapangan Udara Bugis, Malang pada tanggal 30 September 1945 atas prakarsa Suyono, Sulistyono dan Hendro (Soewito, Suyono, dan Suhartono, 2008, hlm 10), namun menurut Kartadarmadja (1981, hlm. 38) menyatakan bahwa:

Sekolah Penerbang di Malang hanyalah merupakan kursus pengetahuan praktis yang berisi ceramah-ceramah saja. Sifatnya hanya menyebarkan pengetahuan tentang penerbang saja. Sedangkan Sekolah Penerbang di Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang ahli, didirikan dalam situasi perjuangan kemerdekaan, untuk segera dapat dicetak pilot-pilot berkebangsaan Indonesia.

Pengembangan sekolah penerbang bukanlah sesuatu hal yang sederhana, keberhasilannya tidaklah dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana. Mengingat keadaan saat itu yang serba darurat, maka fasilitas yang diperoleh siswa penerbang pun terbatas. Bahkan pada saat *Royal Air Force* (RAF) mengunjungi Sekbang Maguwo, mereka mengatakan “*you are flying a coffin*” (anda menerbangkan peti mati), hal itu karena menurut mereka pesawat latih sejenis *Cureng* seharusnya sudah lama tidak lagi digunakan (Sutrisno, 1985, hlm. 3). Akan tetapi meskipun harus melalui berbagai rintangan termasuk keamanan jiwa mereka saat terbang, para tetap melaksanakan pendidikan penerbangan sehingga program pendidikan tetap berlangsung. Sehingga Zed (2012) mengatakan bahwa:

“Bagaimanapun sejarah penerbangan Republik Indonesia zaman perang Kemerdekaan adalah sejarah prestasi, tetapi juga sebagai sejarah yang penuh akan pengorbanan. Berprestasi karena dalam serba keterbatasan, putra-putri terbaik bangsa pada masa ini sudah mampu membuat eksperimen yang berani membuat “besi terbang” dari bahan-bahan sederhana dan mampu menjelajahi jagat sampai ke balik awan menghindari pengejaran pesawat pemburu Belanda. Namun pada saat yang sama sejarah penerbangan juga meminta korban”.

Dengan kontibusinya yang sangat krusial dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia maka sepatutnya masyarakat tahu akan pembentukan dan peranan sekolah penerbang ini. Namun penulisan mengenai topik pendidikan militer pada masa revolusi sangatlah terbatas. Secara umum penulisan tentang militer telah banyak dilakukan tetapi penulisan tersebut berkisar pada topik seputar pertempuran-pertempuran, tokoh yang terlibat dalam pertempuran, strategi militer, keadaan militer dari masa ke masa, serta hubungan sipil dan militer. Namun penelitian mengenai pendidikan kemiliteran pada masa revolusi belumlah banyak dikaji. Sepengetahuan penulis, di Universitas Pendidikan Indonesia baru ada dua skripsi yang mengkaji tentang Angkatan Udara Republik Indonesia yakni skripsi karya Ghina Ambarrani

Ikmal Maulana, 2017

DARI YOGYA-MERAJUT ASA-MENGGAPAI ANGKASA: SEKOLAH PENERBANG MAGUWO SEBAGAI LEMBAGA PENCETAK PENERBANG AURI PADA MASA REVOLUSI FISIK (1945-1950)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Niagari dengan judul *Peranan R. Suryadi Suryadharma dalam Membangun Angkatan Udara Republik Indonesia Tahun 1946-1962*, serta skripsi karya Trisna Awaludin Harisman dengan judul *Peranan Marsekal Muda R. H. Atje Wiriadinata dalam Pembentukan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) Angkatan Udara Tahun 1952-1964*. Baik Niagari (2014) maupun Harisman (2014) fokus penelitiannya terletak pada peranan seorang tokoh dalam mengembangkan Angkatan Udara, sedangkan bagaimana pendidikan militernya tidak diteliti.

Berdasarkan hal-hal tersebutlah, maka penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul *DARI YOGYA-MERAJUT ASA-MENGGAPAI ANGKASA: Sekolah Penerbang Maguwo sebagai Lembaga Pencetak Penerbang AURI pada masa Revolusi Fisik (1945-1950)*. Penentuan tahun 1945-1950 sebagai aspek waktu dalam penelitian ini karena di tahun 1945 Adisutjipto mendirikan Sekolah Penerbang Maguwo sedangkan tahun 1950 adalah tahun saat KSAU mengeluarkan surat keputusan KSAU No.35/instr/K/50 yang antara lain isinya adalah:

“Bahwa di dalam bidang pendidikan atau latihan, baik pendidikan atau latihan militer umum maupun pendidikan atau latihan militer khusus bagi perwira AURI sendiri dan pendaftar atau pelajar baru pada suatu waktu akan dipersatukan dalam suatu Akademi AURI” (Suhaidi, 2003, hlm. 20).

Surat tersebut direalisasikan dengan pembentukan Komando Pendidikan yang bertugas sebagai perencana dan pelaksana pendidikan, dan pada perkembangan berikutnya sekolah penerbangan akan dipindahkan ke Pangkalan Angkatan Udara Kalijati.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang didirikannya Sekolah Penerbang Maguwo?
2. Bagaimana proses pembelajaran dan kondisi sarana prasarana di Sekolah Penerbang Maguwo?
3. Bagaimana kontribusi Sekolah Penerbang Maguwo terhadap perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya tahun 1945-1950?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis latar belakang didirikannya Sekolah Penerbang Maguwo.
2. Mendeskripsikan proses pembelajaran serta kondisi sarana prasarana yang digunakan di Sekolah Penerbang Maguwo.
3. Mendeskripsikan kontribusi Sekolah Penerbang Maguwo terhadap perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya tahun 1945-1950.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi ilmu dan pengetahuan sejarah, terutama untuk memperkaya penulisan sejarah Indonesia pada masa Revolusi, Sejarah Angkatan Udara, serta Sejarah Pendidikan di Indonesia, dalam hal ini tentang bagaimana proses perintisan sekolah penerbang di Indonesia.
2. Dalam dunia pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan materi pembelajaran Sejarah di Kelas XI berkaitan dengan topik Revolusi Menegakan Panji-Panji NKRI.
3. Bagi Departemen Pendidikan Sejarah, skripsi ini dapat dijadikan sumber rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Angkatan Udara Republik Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang perlunya topik mengenai Sekolah Penerbang Maguwo ini ditulis, berikutnya terdapat juga rumusan masalah yakni batasan materi yang akan dibahas serta kerangka utama dari penulisan skripsi ini. Kemudian terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis serta Struktur organisasi Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bagaian ini sakan diuraikan mengenai teori-teori, konsep-konsep, serta penelitian terdahulu tentang tema yang penulis kaji yakni peranan Sekolah Penerbang Maguwo pada masa Revolusi Fisik di Indonesia. Selain itu, bab ini juga berisi landasan teoritis yang digunakan penulis sebagai alat bantu untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.,

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang merupakan pondasi utama dari pada sebuah penelitian. Adapun penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian sejarah. Lingkup dari penelitian sejarah sendiri meliputi pemilihan topik penelitian, pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

BAB IV Pembahasan. Dalam bab ini penulis memaparkan semua hasil penelitian dalam bentuk uraian deskriptif yang ditujukan agar semua keterangan yang ada dalam pembahasan dapat dijelaskan secara rinci. Adapun pemaparan yang akan dijelaskan dalam bab ini diantaranya: *Pertama*, pembahasan mengenai latar belakang didirikannya Sekolah Penerbang Maguwo. *Kedua*, pembahasan mengenai kurikulum, proses pembelajaran serta sarana prasarana yang digunakan di Sekolah Penerbang Maguwo. *Ketiga*, pembahasan mengenai kontribusi Sekolah Penerbang Maguwo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1950.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi. Bab ini mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis peneliti secara keseluruhan terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah dideskripsikan pada bab sebelumnya. Selain itu dikemukakan juga pula rekomendasi dari hasil penelitian.